
Analisis Spasial Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan Pendekatan OLS dan GWR

Naili Aulia Dewi¹, Tenry Kusuma Astuti², Salsabila Ayubita Pandega³, Destifa Prastiti Kusuma⁴, Rian Ahmadul Huda⁵, Ahmad Adzkiya Abimanyu Daryono⁶
¹²³⁴⁵⁶Universitas Gadjah Mada

Email: *nailiauliadewi@mail.ugm.ac.id, tenrykusumaastuti@mail.ugm.ac.id, salsabilaayubitapandega@mail.ugm.ac.id, destifaprastitikusuma@mail.ugm.ac.id, rianahmadulhuda2003@mail.ugm.ac.id, ahmadadzkiyaabimanyudaryono@mail.ugm.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the factors influencing poverty levels in Central Java Province using two analytical approaches: Ordinary Least Squares (OLS) and Geographically Weighted Regression (GWR). The OLS approach is used to examine global influences, while the GWR approach captures local variations in influence across regions. The three main variables examined in this study are the Gender Inequality Index (GIG), the Gini Index as an indicator of income inequality, and the Regency/City Minimum Wage (UMK). The analysis results indicate that both income inequality and gender inequality significantly influence poverty levels. However, the degree of influence of each variable varies across regions, as indicated by the GWR analysis. High income inequality and wide gender gaps contribute to high poverty rates, particularly in regions with low UMKs. Therefore, this study recommends inclusive and region-based policies. Some suggested policies include increasing gender equality through women's empowerment, strengthening regulations and implementing UMK policies to suit local needs, and developing social programs based on regional socio-economic conditions. With these steps, it is hoped that social and economic inequality can be reduced, so that the poverty rate in Central Java Province can be reduced significantly and sustainably.

Keywords: *Analysis, factors, poverty, ols and gwr*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan dua pendekatan analisis, yaitu *Ordinary Least Squares* (OLS) dan *Geographically Weighted Regression* (GWR). Pendekatan OLS digunakan untuk melihat pengaruh secara global, sementara GWR digunakan untuk menangkap variasi pengaruh antar wilayah secara lokal. Tiga variabel utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan, serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Hasil analisis menunjukkan bahwa baik ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, tingkat pengaruh masing-masing variabel berbeda di setiap daerah, yang ditunjukkan dengan hasil analisis GWR. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dan kesenjangan gender yang lebar berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan, terutama di wilayah dengan UMK yang rendah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kebijakan yang bersifat inklusif dan berbasis wilayah. Beberapa kebijakan yang disarankan antara lain peningkatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, penguatan regulasi dan pelaksanaan kebijakan UMK agar sesuai dengan kebutuhan lokal, serta pengembangan program sosial yang berbasis pada kondisi

sosial-ekonomi wilayah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ketimpangan sosial dan ekonomi dapat ditekan, sehingga angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dapat berkurang secara signifikan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Analisis, faktor-faktor, kemiskinan, ols dan gwr

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan suatu isu penting yang menjadi masalah umum hampir di seluruh negara, terutama Indonesia. Kemiskinan sendiri merupakan suatu keadaan dimana terdapat ketidakmampuan atau kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan juga didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana pendapatan dinilai tidak mampu mencapai batas garis nilai standar kebutuhan minimum baik itu *poverty line* maupun *poverty threshold*. Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 25.90 juta orang dari total penduduk Indonesia per Desember 2023 sebesar 280.73 juta jiwa dan paling banyak berada di Pulau Jawa melebihi 13 juta penduduk miskin. Salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terparah di Pulau Jawa yaitu Jawa Tengah sebesar lebih dari 3.8 juta jiwa setelah urutan pertama ditempati oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 4.1 juta jiwa. Setiap daerah pasti memiliki tingkat keparahan kemiskinan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Dalam studi ini, beberapa indikator yang dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah kemudian diambil dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Gini Ratio, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).



Pada penelitian kali ini fokus yang diambil sebagai bahan uji terkait kemiskinan adalah Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri terletak di 5°040' - 8°030' Lintang Selatan dan 108°030' - 111°030' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi ini memiliki 29 kabupaten, 6 kota dengan ibukota Jawa tengah yakni Kota Semarang. Selain itu Jawa Tengah memiliki 753 kelurahan, kecamatan 576, dan 7.810 desa.

Metode Penelitian

Metode *Ordinary Least Square* (OLS) adalah metode yang terdapat dalam analisis regresi berganda. Metode ini digunakan untuk meminimalisir jumlah kuadrat kesalahan dengan mengestimasi suatu garis regresi. Metode OLS termasuk jenis metode ekonometrik dengan 2

variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Hasil akhir yang dimiliki oleh metode OLS adalah fungsi regresi populasi yang akan digunakan untuk estimasi data. Dalam penelitian ini, OLS (*Ordinary Least Squares*) diperuntukkan guna menganalisa hubungan linear antara variabel independen yakni Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Gini, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan variabel dependennya yakni tingkat kemiskinan yang diukur dengan persentase penduduk miskin. Signifikansi antar variabel independen terhadap variabel dependen digunakan untuk melakukan metode selanjutnya, yakni metode GWR.

Setelah dilakukan analisis OLS dan didapatkan variabel yang signifikan, selanjutnya penelitian ini melakukan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis spasial untuk mengukur pengaruh IKG, Indeks Gini dan UMK terhadap tingkat kemiskinan di setiap kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Metode analisis spasial yang digunakan adalah dengan metode *Geographically Weighted Regression* (GWR). *Geographically Weighted Regression* (GWR) digunakan ketika hubungan antara variabel independen dan dependen tidak bersifat konstan di seluruh wilayah, melainkan dipengaruhi oleh faktor geografis. GWR memungkinkan analisis yang lebih spesifik dan akurat. Model GWR untuk penelitian ini :

$$\text{Tingkat Kemiskinan} = 26,033292 - 33,386475\text{GINI} - 0,0052702\text{IKG} - 0,000004\text{UMK} - 0,422913\text{IPM} + \epsilon$$

Data

Tabel Kebutuhan Data

Keterangan	Jenis	Tahun	Sumber
Tingkat Kemiskinan	Sekunder	2023	BPS Provinsi Jawa Tengah
Upah Minimum Kabupaten/Kota	Sekunder	2023	BPS Provinsi Jawa Tengah
Indeks Gini	Sekunder	2023	BPS Provinsi Jawa Tengah
Indeks Ketimpangan Gender	Sekunder	2023	BPS Provinsi Jawa Tengah
Indeks Pembangunan Manusia	Sekunder	2023	BPS Provinsi Jawa Tengah
Shapefile Provinsi Jawa Tengah	-	2023	INA GEOSPASIAL

Kabupaten/Kota	PKM (%)	UMK (Rupiah)	Gini	IKG	IPM (%)
Cilacap	10,99	2383090	0,364	0,433	72,04

Banyumas	12,53	2118214	0,397	0,193	69,16
Purbalingga	14,99	2130981	0,354	0,311	73,96
Banjarnegara	14,90	1958170	0,376	0,236	69,16
Kebumen	16,34	2043902	0,333	0,344	71,88
Purworejo	11,33	2035890	0,337	0,193	74,35
Wonosobo	15,58	2076209	0,355	0,427	70,18
Magelang	10,96	2236777	0,358	0,259	71,56
Boyolali	9,81	2155712	0,365	0,306	75,41
Klaten	12,28	2152323	0,406	0,190	77,59
Sukoharjo	7,58	2138248	0,401	0,145	78,65
Wonogiri	10,94	1968448	0,351	0,198	71,97
Karanganyar	9,79	2207484	0,389	0,279	77,31
Sragen	12,87	1969569	0,336	0,457	75,1
Grobogan	11,72	2029569	0,324	0,400	71,49
Blora	11,49	2040080	0,349	0,407	70,63
Rembang	14,17	2015927	0,332	0,265	71,89
Pati	9,31	2130981	0,312	0,233	73,59
Kudus	7,24	2439814	0,350	0,226	76,71
Jepara	6,61	2272627	0,326	0,425	73,85
Demak	12,01	2680421	0,309	0,244	74,07
Semarang	7,17	2480988	0,388	0,416	75,13
Temanggung	9,26	2027569	0,359	0,192	71,33
Kendal	9,39	2508300	0,402	0,229	73,86
Batang	8,92	2282026	0,333	0,397	70,2

Pekalongan	9,67	2247346	0,325	0,351	76,71
Pemalang	15,03	2081783	0,334	0,378	68,08
Tegal	7,30	2106238	0,358	0,184	71,12
Brebes	15,78	2018837	0,327	0,435	69,71
Kota Magelang	6,11	2066007	0,419	0,121	81,17
Kota Surakarta	8,44	2174169	0,383	0,159	83,54
Kota Salatiga	4,66	2284180	0,417	0,143	84,99
Kota Semarang	4,23	3060349	0,405	0,168	84,43
Kota Purbalingga	6,81	2130981	0,321	0,176	70,51
Kota Tegal	7,68	2145012	0,378	0,294	77,06

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan data dari seluruh wilayah di Jawa Tengah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan demografis yang ada di provinsi tersebut pada tahun yang bersangkutan. Data yang digunakan mencakup 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, yang terdiri dari kabupaten seperti Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga, serta kota-kota seperti Semarang, Solo, dan Tegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (%), Indeks Gini, dan UMK (ribu rupiah) terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dengan regresi linier menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) untuk mengetahui signifikan atau tidak antara variabel independen (IKG dan Indeks Gini) terhadap variabel dependen (kemiskinan), sebelum melanjutkan ke analisis *Geographically Weighted Regression* (GWR) untuk mendeteksi variasi pengaruh secara spasial.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari Persentase Penduduk Miskin, Indeks Ketimpangan Gender (IKG), dan Indeks Gini di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2023. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Data spasial berupa koordinat geografis wilayah administratif kabupaten/kota juga dikumpulkan dalam format shapefile untuk keperluan analisis GWR. Tahap pertama penelitian ini adalah analisis regresi linier dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Model OLS digunakan untuk mengidentifikasi signifikansi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara keseluruhan, tanpa mempertimbangkan variasi antarwilayah. Selanjutnya, dilakukan analisis GWR menggunakan ArcGis untuk mengetahui variasi spasial dari variabel independen terhadap variabel dependen di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil dan Pembahasan

A. Kemiskinan

Kotze (dalam Hikmat, 2004:6) mengungkapkan bahwa masyarakat miskin sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memanfaatkan peluang yang tersedia guna memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun kadang-kadang bantuan eksternal digunakan, bantuan tersebut tidak selalu dapat diandalkan, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan dari luar. Namun, pendekatan pemberdayaan ini dinilai kurang berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat bertahan dan berkembang tanpa berinteraksi dengan kelompok masyarakat lain. Isolasi semacam ini justru cenderung menciptakan sikap pasif dan memperburuk kondisi kemiskinan. Kemiskinan menurut Suparlan (1995), didefinisikan sebagai kondisi standar hidup yang rendah, ditandai oleh kekurangan materi yang dialami oleh sebagian kelompok masyarakat dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku umum di komunitas tersebut. Rendahnya standar hidup ini secara langsung berdampak pada tingkat kesehatan, kehidupan moral, serta rasa harga diri individu-individu yang termasuk dalam kategori miskin.

1. *Ordinary Least Squares (OLS)*

Metode OLS pertama kali diperkenalkan oleh Carl Frederich Gauss, seorang matematikawan asal Jerman. Dengan memenuhi asumsi-asumsi tertentu, metode ini memiliki sejumlah sifat statistik yang menjadikannya salah satu pendekatan paling andal (*powerful*) dan populer dalam analisis regresi (Gujarati, 2009:71). Metode OLS memiliki beberapa keunggulan, antara lain kemudahan penerapannya dan varians yang paling rendah dibandingkan dengan penaksir linear lainnya. Oleh karena itu, metode OLS dikenal sebagai Penaksir Tak Bias Linear Terbaik (*Best Linear Unbiased Estimator/BLUE*) (Gujarati, 2006:150).

2. *Geographically Weighted Regression (GWR)*

Model GWR adalah bentuk lanjutan dari metode regresi, dengan perbedaan utama terletak pada parameter persamaan yang bervariasi di setiap lokasi pengamatan. Dalam analisis GWR, model yang dihasilkan hanya berlaku untuk menduga parameter di lokasi pengamatan tertentu dan tidak dapat digunakan untuk memperkirakan parameter di lokasi lain (Walter et al. 2005).

3. *Upah Minimum Kabupaten/Kota*

Menurut Eddy Supriyadi, UMK adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk memastikan adanya upah terendah bagi pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar di wilayah tersebut. Dengan adanya UMK, diharapkan tercipta hubungan kerja yang lebih adil dan seimbang antara pengusaha dan pekerja. Namun, penerapan UMK sering menjadi topik perdebatan, terutama mengenai pengaruhnya terhadap daya saing perusahaan dan keberlanjutan ekonomi daerah.

4. *Indeks Gini*

Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini adalah ukuran untuk menilai ketimpangan distribusi pendapatan yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang statistikawan asal Italia, Corrado Gini, dan dipublikasikan pada tahun 1912 (*International NGO Forum on Indonesia Development*, 2018). Ketimpangan pendapatan merujuk pada kondisi di mana distribusi pendapatan di masyarakat tidak merata. Indeks Gini memiliki nilai antara 0 hingga 1, di mana

nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, sementara nilai 1 mencerminkan ketimpangan yang sempurna (Todaro dan Smith, 2006).

5. Indeks Ketimpangan Gender

Pada tahun 2010, United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan Gender Inequality Index (GII) sebagai indikator untuk mengukur ketimpangan gender. GII menggambarkan sejauh mana ketidakoptimalan dalam pembangunan manusia yang mencakup tiga aspek utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi, yang disebabkan oleh ketimpangan gender (UNDP, 2016). GII diharapkan dapat memperbaiki pengukuran ketimpangan gender yang telah ada sebelumnya, seperti Gender Empowerment Measure (GEM) dan Gender Development Index (GDI) (BPS, 2019).

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks ini dikembangkan pada tahun 1990 oleh pemenang Nobel asal India, Amartya Sen, bersama ekonom Pakistan, Mahbub ul Haq, dengan bantuan Gustav Ranis dari Universitas Yale dan Lord Meghnad Desai dari *London School of Economics*. Sejak itu, indeks ini digunakan oleh UNDP dalam laporan tahunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan ukuran yang membandingkan harapan hidup, tingkat melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. Indeks ini menggambarkan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan aspek kehidupan lainnya (Wikipedia).

7. Hubungan Indeks Kesetaraan Gender dengan Tingkat Kemiskinan

Ketimpangan gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan laporan Bank Dunia (2020), kesetaraan gender dapat memperbesar partisipasi perempuan dalam pasar kerja, meningkatkan akses mereka ke pendidikan dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mengurangi kemiskinan. Laporan *UN Women* (2015) juga menyatakan bahwa kebijakan yang memperluas akses perempuan terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, yang pada gilirannya akan menurunkan kemiskinan baik di tingkat keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketimpangan gender terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

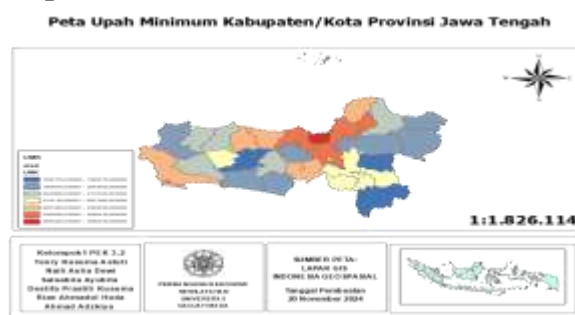
B. Pola Spasial

1. Tingkat Kemiskinan



Berdasarkan peta kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, terlihat distribusi tingkat kemiskinan yang bervariasi antar kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi ditandai dengan warna merah, antara lain Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Grobogan. Tingginya tingkat kemiskinan di wilayah-wilayah ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan akses ekonomi, infrastruktur, atau rendahnya laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, wilayah dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah, ditandai dengan warna biru, meliputi Kota Semarang, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Sukoharjo. Tingkat kemiskinan yang rendah di wilayah ini dapat mengindikasikan adanya akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Adapun wilayah lain dengan tingkat kemiskinan sedang, ditandai dengan warna oranye dan kuning, mencakup Kabupaten Banyumas, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Magelang, yang berada di antara kategori tertinggi dan terendah. Untuk mengurangi ketimpangan ini, diperlukan strategi yang terfokus, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, serta pengembangan lapangan pekerjaan di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota



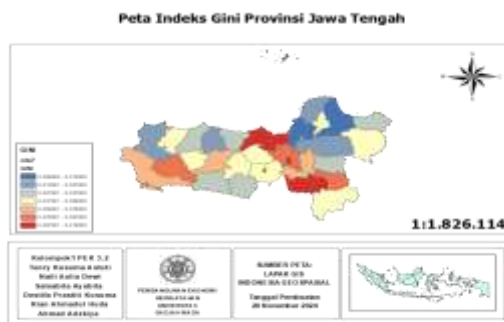
Peta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Tengah memberikan gambaran visual mengenai distribusi besaran upah minimum di berbagai wilayah. Warna-warna yang digunakan pada peta merepresentasikan rentang nilai UMK, di mana warna biru umumnya menunjukkan UMK rendah, sedangkan warna kuning hingga merah menunjukkan UMK yang lebih tinggi. Daerah dengan UMK tinggi cenderung berada di kota besar atau wilayah industri, seperti Kota Semarang, Solo, dan Kabupaten Kendal, yang memiliki aktivitas ekonomi yang lebih dinamis dan kebutuhan hidup lebih tinggi. Sebaliknya, daerah dengan UMK rendah biasanya berada di wilayah agraris atau terpencil seperti Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Blora, di mana biaya hidup dan aktivitas ekonomi cenderung lebih rendah.

Besaran UMK ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk Kebutuhan Hidup Layak (KHL), potensi dan kegiatan ekonomi daerah, serta kebijakan pemerintah setempat. Daerah dengan biaya hidup tinggi atau sektor ekonomi yang berkembang pesat, seperti industri atau pariwisata, biasanya memiliki UMK yang lebih besar. Sebaliknya, daerah dengan aktivitas ekonomi berbasis sektor primer, seperti pertanian, cenderung memiliki UMK yang lebih rendah. Kesenjangan nilai UMK di berbagai kabupaten/kota ini mencerminkan perbedaan tingkat pembangunan ekonomi dan kebutuhan hidup masing-masing wilayah.

Peta ini memiliki skala 1:1.826.114, yang memungkinkan visualisasi geografis wilayah Jawa Tengah secara proporsional. Tujuan utama peta ini adalah untuk memberikan informasi

mengenai perbandingan UMK antar daerah, yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Pemerintah dapat menggunakan data ini untuk merancang kebijakan pengupahan yang lebih adil dan pemerataan pembangunan. Sementara itu, pekerja dan pengusaha dapat menjadikannya sebagai acuan dalam memahami tingkat upah di berbagai wilayah. Peta ini juga bermanfaat bagi investor yang ingin mengetahui standar upah di daerah tujuan investasi mereka. Secara keseluruhan, peta ini membantu menggambarkan disparitas dan potensi wilayah di Jawa Tengah berdasarkan aspek pengupahan.

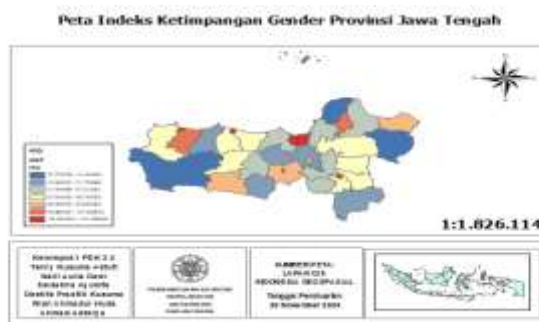
3. Indeks Gini



Gambar tersebut merupakan peta Indeks Gini di Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di berbagai kabupaten/kota dalam Provinsi Jawa Tengah. Dalam peta ini, gradasi warna digunakan untuk memvisualisasikan tingkat ketimpangan di masing-masing wilayah. Warna biru muda merepresentasikan wilayah dengan ketimpangan rendah (Indeks Gini antara 0.309000 hingga 0.312000), sedangkan warna merah tua menunjukkan wilayah dengan ketimpangan tinggi (Indeks Gini antara 0.397001 hingga 0.491000).

Secara umum, peta ini memperlihatkan adanya variasi tingkat ketimpangan di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Wilayah dengan warna biru muda yang mencerminkan ketimpangan rendah, kemungkinan besar adalah daerah pedesaan atau wilayah dengan struktur ekonomi yang lebih merata. Sebaliknya, wilayah dengan warna merah tua, yang menunjukkan ketimpangan yang tinggi, kemungkinan adalah pusat-pusat ekonomi atau kawasan urban yang memiliki kesenjangan signifikan antara kelompok kaya dan miskin. Faktor-faktor yang mungkin memengaruhi perbedaan ini antara lain tingkat urbanisasi, keberadaan sektor ekonomi dominan seperti industri atau jasa, serta akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan skala 1:1.826.114, peta ini memberikan gambaran komprehensif mengenai distribusi ketimpangan di Jawa Tengah yang dapat menjadi landasan untuk analisis lebih mendalam. Peta ini juga memberikan peluang untuk analisis lebih lanjut dengan menghubungkan data Indeks Gini ini dengan indikator sosial-ekonomi lainnya, guna memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi di Jawa Tengah.

4. Indeks Ketimpangan Gender



Peta Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jawa Tengah memberikan gambaran tentang distribusi ketimpangan gender di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Pada peta ini, terdapat variasi warna yang menunjukkan perbedaan tingkat ketimpangan di setiap wilayah. Warna biru muda mencerminkan daerah dengan nilai IKG yang rendah, menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki ketimpangan gender yang lebih kecil. Sebaliknya, warna kuning hingga merah menunjukkan tingkat ketimpangan gender yang menengah, sementara warna merah menandakan ketimpangan gender yang tinggi, menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam aspek kesetaraan gender di wilayah tersebut.

Distribusi ini mengindikasikan bahwa tidak semua daerah di Jawa Tengah menghadapi tingkat ketimpangan gender yang sama. Wilayah dengan nilai IKG rendah kemungkinan memiliki kebijakan yang lebih baik dalam mendukung kesetaraan gender, seperti akses yang lebih merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Di sisi lain, daerah dengan nilai IKG tinggi mungkin menghadapi kendala seperti terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, atau pekerjaan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan intervensi khusus perlu difokuskan pada wilayah dengan nilai IKG tinggi untuk mengurangi ketimpangan gender. Secara keseluruhan, peta ini dapat berguna bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi wilayah prioritas dalam meningkatkan kesetaraan gender. Dengan skala yang detail, peta ini mampu memberikan wawasan lokal tentang tingkat ketimpangan, sehingga langkah-langkah yang lebih tepat dan efektif dapat diambil untuk menciptakan kondisi yang lebih setara di seluruh provinsi.

C. Hasil Regresi OLS

Variable	Coefficient [a]	StdError	t-Statistic	Probability [b]	Robust_SE	Robust_t	Robust_Pr [b]	VIF [c]
Intercept	26,033292	5,381751	4,837328	0,000031*	5,182968	5,022854	0,000018*	-----
GINI	-33,386475	15,147032	-2,204159	0,034826*	14,045173	-2,377078	0,023600*	1,032965
IKG	-0,052702	0,018280	-2,883091	0,006986*	0,013376	-3,940095	0,000413*	1,032965
UMK	-0,000004	0,000002	-2,089052	0,045006*	0,000002	-2,232271	0,032961*	1,319799
IPM	-0,422913	0,104948	-4,029743	0,000335*	0,085359	-4,954539	0,000024*	1,314507

Input Features: RBI_50K_2023_Jawa Tengah		Dependent Variable: PKM	
Number of Observations:	35	Akaike's Information Criterion (AICc) [d]:	165.017936
Multiple R-Squared [d]:	0,553032	Adjusted R-Squared [d]:	0,509777
Joint F-Statistic [e]:	12,785397	Prob(>F), (3,31) degrees of freedom:	0,000013*
Joint Wald Statistic [e]:	61,494217	Prob(>chi-squared), (3) degrees of freedom:	0,000000*
Koenker (BP) Statistic [f]:	3,664672	Prob(>chi-squared), (3) degrees of freedom:	0,300024
Jarque-Bera Statistic [g]:	0,282183	Prob(>chi-squared), (2) degrees of freedom:	0,868410

Berdasarkan hasil analisis regresi OLS, semua variabel independen memiliki *p-value* di bawah 0,05, yang menunjukkan bahwa setiap variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). *Intercept* memiliki *p-value* sebesar 0,000031, menunjukkan signifikansi tinggi. Variabel Indeks Gini memiliki *p-value* sebesar 0,0348 dan koefisien -33,386, yang mengindikasikan hubungan negatif signifikan antara ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan. Artinya, setiap kenaikan Indeks Gini sebesar satu satuan akan menurunkan kemiskinan sebesar 33,386%. Ini berarti bahwa meskipun ketimpangan meningkat, tingkat kemiskinan cenderung menurun, hal tersebut karena faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi yang mengimbangi dampak ketimpangan. Di Jawa Tengah, meskipun Indeks Gini menunjukkan peningkatan yang mencerminkan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi, tingkat kemiskinan justru cenderung menurun. Hal ini didukung oleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa variabel Indeks Gini memiliki *p-value* sebesar 0,0348 dan koefisien -33,386. Kejadian tersebut dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain, seperti pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan kebijakan sosial yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, seperti peningkatan anggaran untuk program kesejahteraan sosial yang efektif, yang dapat mengimbangi dampak negatif dari ketimpangan tersebut. Dengan demikian, meskipun ketimpangan pendapatan meningkat, kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat menyebabkan penurunan angka kemiskinan.

Indeks Kesetaraan Gender (IKG) memiliki *p-value* sebesar 0,0069 dan koefisien -0,0527, menunjukkan bahwa peningkatan kesetaraan gender secara signifikan berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Kesetaraan gender yang lebih baik, misalnya melalui akses yang sama terhadap pendidikan dan pekerjaan, dapat mengurangi kerentanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan *p-value* 0,0450 dan koefisien -0,000004 menunjukkan hubungan negatif yang signifikan meskipun kecil. Kenaikan UMK, meskipun hanya sedikit, memiliki dampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama di kalangan pekerja formal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki *p-value* 0,0003 dan koefisien -0,4229, yang menunjukkan bahwa peningkatan IPM secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan. Peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak memainkan peran penting dalam pengurangan kemiskinan secara keseluruhan.

Model menunjukkan hasil yang cukup baik dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan, dengan R-Squared sebesar 0,5530, yang berarti sekitar 55,30% variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam model. Sementara itu, Adjusted R-Squared yang sebesar 0,5098 menunjukkan bahwa model ini

tetap dapat menjelaskan lebih dari 50% variasi tingkat kemiskinan setelah mempertimbangkan jumlah variabel yang digunakan. Hasil Uji F yang signifikan, dengan nilai F-Statistic sebesar 12,7854 dan *p-value* 0,000013, menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan, yang berarti variabel-variabel independen secara kolektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, hasil *Koenker (BP) Statistic* dan *Jarque-Bera Statistic* menunjukkan bahwa model ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas atau pelanggaran terhadap asumsi normalitas residual, yang semakin menguatkan validitas model ini.

D. Hasil GWR

Dalam analisis Geographically Weighted Regression (GWR), variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak dilanjutkan atau diteruskan dalam model karena terdeteksi adanya masalah multikolinearitas. Multikolinearitas adalah kondisi di mana terdapat hubungan atau korelasi yang sangat tinggi antara dua atau lebih variabel independen dalam sebuah model regresi. Kehadiran multikolinearitas dapat menyebabkan berbagai masalah dalam analisis, seperti mempersulit estimasi koefisien regresi yang akurat, mengurangi stabilitas model, serta menghasilkan interpretasi yang bias. Dalam kasus ini, terindikasi bahwa variabel IPM memiliki hubungan yang sangat erat atau korelasi tinggi dengan salah satu atau beberapa variabel independen lainnya yang digunakan dalam model.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan pengaruh variabel IPM terhadap variabel dependen sulit untuk dipisahkan dari pengaruh variabel lainnya, sehingga mengurangi validitas hasil analisis. Selain itu, multikolinearitas juga dapat mempengaruhi tingkat signifikansi variabel dalam model, di mana variabel yang seharusnya signifikan secara statistik menjadi tidak signifikan karena efek interaksi antar variabel independen yang terlalu kuat. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas, keandalan, dan keakuratan model regresi GWR, variabel IPM diputuskan untuk dikeluarkan dari model. Keputusan untuk mengeluarkan variabel IPM bertujuan agar hasil analisis yang diperoleh lebih valid, bebas dari bias akibat multikolinearitas, dan dapat diinterpretasikan dengan lebih baik. Dengan mengurangi risiko multikolinearitas, model GWR yang digunakan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara variabel independen yang tersisa dengan variabel dependen, serta menghasilkan hasil analisis yang lebih *robust* dan relevan untuk keperluan penelitian maupun pengambilan keputusan.

6. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Kemiskinan



Peta tersebut menunjukkan distribusi pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Warna pada peta digunakan untuk mengilustrasikan besarnya pengaruh UMK terhadap tingkat kemiskinan di setiap kabupaten atau kota, berdasarkan nilai koefisien yang diperoleh dari model analisis spasial (misalnya GWR). Dalam legenda, terlihat bahwa warna yang lebih terang biru muda, seperti Brebes, Tegal, Kota Tegal, Peralang, Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas mencerminkan

pengaruh UMK yang relatif kecil atau bahkan negatif terhadap tingkat kemiskinan, artinya di wilayah ini peningkatan UMK tidak memiliki pengaruh besar terhadap penurunan kemiskinan atau bahkan bisa menyebabkan peningkatan kemiskinan karena efek ekonomi tertentu. Di sisi lain, wilayah warna merah, seperti Rembang dan Blora mengindikasikan koefisien tingkat upah minimum yang lebih tinggi dan menunjukkan pengaruh UMK yang besar dan positif, artinya di wilayah-wilayah ini kenaikan UMK berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan.

Distribusi warna pada peta menunjukkan variasi spasial dari pengaruh UMK terhadap kemiskinan. Daerah yang didominasi warna merah, terutama di bagian timur, kemungkinan besar memiliki struktur ekonomi atau tenaga kerja yang lebih bergantung pada sektor formal. Hal ini memungkinkan upah minimum yang lebih tinggi berdampak langsung pada pengurangan tingkat kemiskinan karena banyak penduduk bekerja di sektor-sektor yang mematuhi aturan UMK. Sebaliknya, daerah-daerah dengan warna biru di bagian barat menunjukkan bahwa peningkatan UMK mungkin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini bisa disebabkan oleh struktur ekonomi yang lebih informal, di mana mayoritas tenaga kerja tidak terpengaruh oleh kebijakan UMK, sehingga dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan menjadi lebih terbatas.

Berdasarkan analisis distribusi pengaruh UMK terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, maka dapat dibuat rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik setiap wilayah.

- a. Untuk wilayah dengan warna biru muda seperti Kabupaten Brebes, Tegal, Kota Tegal, Peralang, Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, kebijakan yang disarankan adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor informal melalui pelatihan keterampilan, dorongan kewirausahaan dengan bantuan modal dan pelatihan UMKM, serta pemberian kebijakan pendukung non-upah seperti bantuan sosial dan subsidi pendidikan.
- b. Untuk wilayah dengan warna merah seperti Kabupaten Rembang dan Blora, rekomendasi kebijakannya meliputi pengawasan ketat terhadap kepatuhan UMK, pengembangan sektor formal melalui insentif investasi, peningkatan pendidikan vokasi untuk tenaga kerja terampil, dan pembangunan infrastruktur strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
- c. Wilayah dengan warna kuning atau oranye seperti Kabupaten Magelang, Klaten, Kendal, dan Temanggung memerlukan kebijakan kombinasi antara peningkatan UMK dengan program kesejahteraan seperti bantuan sosial, diversifikasi ekonomi melalui investasi sektor baru, serta penguatan UMKM dengan pelatihan dan akses keuangan.
- d. Untuk wilayah dengan warna biru tua seperti Kabupaten Kebumen, rekomendasi kebijakannya mencakup penerapan skema UMK fleksibel bagi sektor usaha kecil, subsidi bagi usaha rentan, dan peningkatan akses kredit dengan bunga rendah untuk memperkuat kapasitas produksi dan daya saing usaha kecil.

7. Pengaruh Indeks Gini Terhadap Tingkat Kemiskinan



Peta tersebut menggambarkan distribusi pengaruh Indeks Gini terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Warna pada peta menunjukkan variasi pengaruh Indeks Gini terhadap tingkat kemiskinan di masing-masing kabupaten dan kota, berdasarkan nilai koefisien dari model analisis (seperti GWR). Wilayah warna biru pada peta, seperti Wonogiri, Klaten, Purworejo, dan Kebumen menunjukkan bahwa pengaruh Indeks Gini terhadap tingkat kemiskinan bersifat negatif atau rendah. Hal ini berarti bahwa meskipun terdapat ketimpangan dalam distribusi pendapatan, pengaruhnya terhadap peningkatan kemiskinan relatif kecil atau bahkan tidak signifikan di wilayah tersebut. Sebaliknya, wilayah warna merah, seperti Brebes, Tegal, Kota Tegal, Pemalang, Kota Pekalongan, dan Jepara menggambarkan pengaruh yang kuat atau positif, menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah ini, ketimpangan pendapatan yang tinggi cenderung berkorelasi dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Wilayah-wilayah dengan warna merah ini, terutama di bagian timur dan barat, menjadi perhatian karena tingginya ketimpangan pendapatan yang memberikan dampak signifikan terhadap kemiskinan.

Distribusi warna ini menunjukkan adanya pola spasial dalam pengaruh Indeks Gini terhadap kemiskinan. Wilayah dengan pengaruh negatif atau rendah yang didominasi warna biru, mungkin memiliki program redistribusi pendapatan atau kebijakan sosial yang lebih efektif dalam mengurangi dampak ketimpangan pada kemiskinan. Di sisi lain, daerah dengan warna merah, terutama di bagian tertentu dari Jawa Tengah mungkin memerlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, seperti program bantuan sosial yang lebih merata atau peningkatan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi kelompok miskin.

Berdasarkan distribusi warna pada peta yang menunjukkan pengaruh Indeks Gini terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, dapat disusun rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan masing-masing kategori warna. Untuk wilayah dengan warna biru, seperti Wonogiri, Klaten, Purworejo, dan Kebumen, yang memiliki pengaruh rendah atau bahkan negatif dari ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan, kebijakan perlu difokuskan pada mempertahankan program redistribusi pendapatan yang sudah efektif. Program perlindungan sosial juga perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, serta mendukung sektor informal agar tetap inklusif dalam mengurangi kemiskinan. Selain itu, wilayah-wilayah ini dapat dijadikan model praktik terbaik bagi daerah lain dengan mempelajari keberhasilan kebijakan yang telah diterapkan.

Wilayah dengan warna kuning hingga oranye muda, seperti Magelang, Boyolali, Grobogan, Pati, Kudus, dan Kota Salatiga, memerlukan penguatan kebijakan redistribusi pendapatan melalui optimalisasi kebijakan perpajakan yang progresif dan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan serta pelatihan keterampilan. Penyediaan fasilitas publik yang memadai, seperti layanan kesehatan dan pendidikan, juga sangat penting untuk memperbaiki kondisi kelompok rentan di wilayah ini. Sementara itu, wilayah dengan warna oranye tua hingga merah, seperti Brebes, Tegal, Kota Tegal, Pemalang, Kota Pekalongan, dan Jepara, menunjukkan pengaruh ketimpangan pendapatan yang tinggi terhadap kemiskinan, sehingga membutuhkan intervensi yang lebih agresif. Kebijakan redistribusi pendapatan, seperti program bantuan sosial yang tepat sasaran, perlu diterapkan dengan lebih efektif. Selain itu, penguatan akses perempuan dan kelompok marginal terhadap pendidikan, pelatihan kerja, serta permodalan usaha juga menjadi prioritas. Pemerintah juga perlu meningkatkan investasi di bidang infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung distribusi ekonomi yang lebih merata di wilayah ini. Dengan menerapkan kebijakan berbasis kebutuhan wilayah, dampak ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan dapat diminimalkan, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Berdasarkan distribusi warna pada peta yang menunjukkan pengaruh Indeks Gini terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, dapat disusun rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan masing-masing kategori warna.

- a. Untuk wilayah dengan warna biru, seperti Wonogiri, Klaten, Purworejo, dan Kebumen, yang memiliki pengaruh rendah atau bahkan negatif dari ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan, kebijakan perlu difokuskan pada mempertahankan program redistribusi pendapatan yang sudah efektif. Program perlindungan sosial juga perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, serta mendukung sektor informal agar tetap inklusif dalam mengurangi kemiskinan. Selain itu, wilayah-wilayah ini dapat dijadikan model praktik terbaik bagi daerah lain dengan mempelajari keberhasilan kebijakan yang telah diterapkan.
- b. Wilayah dengan warna kuning hingga oranye muda, seperti Magelang, Boyolali, Grobogan, Pati, Kudus, dan Kota Salatiga, memerlukan penguatan kebijakan redistribusi pendapatan melalui optimalisasi kebijakan perpajakan yang progresif dan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan serta pelatihan keterampilan. Penyediaan fasilitas publik yang memadai, seperti layanan kesehatan dan pendidikan, juga sangat penting untuk memperbaiki kondisi kelompok rentan di wilayah ini.
- c. Sementara itu, wilayah dengan warna oranye tua hingga merah, seperti Brebes, Tegal, Kota Tegal, Pemalang, Kota Pekalongan, dan Jepara, menunjukkan pengaruh ketimpangan pendapatan yang tinggi terhadap kemiskinan, sehingga membutuhkan intervensi yang lebih agresif. Kebijakan redistribusi pendapatan, seperti program bantuan sosial yang tepat sasaran, perlu diterapkan dengan lebih efektif. Selain itu, penguatan akses perempuan dan kelompok marginal terhadap pendidikan, pelatihan kerja, serta permodalan usaha juga menjadi prioritas. Pemerintah juga perlu meningkatkan investasi di bidang infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung distribusi ekonomi yang lebih merata di wilayah ini. Dengan menerapkan kebijakan berbasis kebutuhan wilayah, dampak

ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan dapat diminimalkan, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

7. Pengaruh Indeks Ketimpangan Gender Terhadap Tingkat Kemiskinan



Peta tersebut menggambarkan pengaruh Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Warna yang ditampilkan pada peta, mulai dari biru hingga merah, mencerminkan variasi tingkat pengaruh IKG terhadap kemiskinan. Wilayah dengan warna biru, seperti Brebes, Tegal, Kota Tegal, Pemalang, Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas menunjukkan pengaruh IKG yang rendah terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan adanya kesetaraan gender yang lebih baik dan kemungkinan dampak ketimpangan gender yang minimal terhadap kondisi ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Sebaliknya, wilayah dengan warna merah, seperti Rembang dan Blora yang terletak di bagian timur peta, menunjukkan pengaruh yang sangat tinggi dari ketimpangan gender terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah tersebut mengalami kesenjangan gender yang signifikan, yang mempengaruhi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang ekonomi lainnya.

Wilayah dengan warna merah sebaiknya menjadi fokus perhatian pemerintah untuk diterapkan program-program pemberdayaan perempuan, seperti peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja, serta penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sementara itu, wilayah biru yang menunjukkan kesetaraan gender yang lebih baik dapat dijadikan sebagai model dalam merancang kebijakan serupa di wilayah lain. Oleh karena itu, peta ini tidak hanya menggambarkan distribusi spasial ketimpangan gender, tetapi juga memberikan gambaran mengenai wilayah-wilayah prioritas yang memerlukan intervensi kebijakan untuk mengurangi kesenjangan gender dan kemiskinan. Berdasarkan peta pengaruh Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan untuk menangani wilayah dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut:

1. Wilayah dengan warna merah yang meliputi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora menunjukkan pengaruh besar ketimpangan gender terhadap kemiskinan, menandakan kesenjangan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang ekonomi. Rekomendasi kebijakan meliputi peningkatan akses pendidikan untuk perempuan melalui program beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi guna meningkatkan keterampilan mereka. Pelaksanaan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi perempuan dapat dilakukan dengan menyediakan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan lokal dan akses mudah terhadap kredit mikro. Penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi mereka di posisi strategis di pemerintahan, organisasi

- masyarakat, dan dunia usaha. Kampanye kesetaraan gender juga perlu digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam ekonomi dan pembangunan
2. Wilayah dengan warna kuning atau oranye seperti Kabupaten Magelang, Klaten, Kendal, dan Temanggung menunjukkan pengaruh moderat ketimpangan gender terhadap kemiskinan sehingga memerlukan kebijakan untuk mempercepat perbaikan kesetaraan gender. Rekomendasi kebijakan meliputi penguatan kebijakan pro-gender di sektor ekonomi melalui insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan perempuan secara signifikan dan menyediakan fasilitas ramah perempuan. Peningkatan pendidikan vokasi untuk perempuan perlu difokuskan pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan sektor ekonomi lokal seperti pariwisata atau manufaktur. Selain itu, peningkatan kesadaran gender dalam masyarakat melalui edukasi komunitas tentang pentingnya akses setara ke pendidikan dan ekonomi juga perlu dilakukan
 3. Wilayah dengan warna biru seperti Kabupaten Brebes, Tegal, Kota Tegal, Pemalang, Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang relatif baik sehingga dapat dijadikan model kebijakan bagi daerah lain. Rekomendasi kebijakan meliputi dokumentasi dan replikasi praktik baik yang berhasil dalam mendorong kesetaraan gender untuk diadopsi oleh wilayah lain. Peningkatan peran perempuan dalam kewirausahaan perlu didorong melalui pengembangan UMKM berbasis perempuan untuk memperluas dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penguatan akses perempuan ke sumber daya ekonomi seperti kepemilikan lahan, kredit usaha, dan pelatihan lanjutan juga penting dilakukan untuk mengurangi potensi ketimpangan baru.

8. Pengaruh Indeks Gini dan Indeks Ketimpangan Gender Terhadap Tingkat Kemiskinan



Peta tersebut menggambarkan pengaruh gabungan antara Indeks Gini dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Warna pada peta menunjukkan tingkat pengaruh gabungan kedua indeks tersebut, mulai dari biru

(pengaruh rendah) hingga merah (pengaruh tinggi). Wilayah yang berwarna merah, terutama di bagian timur, mengindikasikan bahwa pengaruh ketimpangan gender dan ketimpangan pendapatan secara bersamaan sangat signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut mengalami tantangan besar, baik dari sisi kesenjangan gender maupun distribusi pendapatan. Ketimpangan ini dapat berdampak pada keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan peluang pekerjaan, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, wilayah dengan warna biru menunjukkan pengaruh yang rendah dari kedua indeks terhadap kemiskinan. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa di wilayah tersebut terdapat distribusi pendapatan yang lebih merata dan tingkat kesetaraan gender yang lebih baik, sehingga dampaknya terhadap kemiskinan relatif lebih kecil.

Secara keseluruhan, peta ini memberikan informasi penting untuk menentukan wilayah prioritas dalam upaya pengurangan kemiskinan. Wilayah dengan warna merah memerlukan perhatian lebih, terutama dalam bentuk intervensi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesetaraan gender. Program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, dan pelatihan keterampilan kerja dapat menjadi solusi yang relevan. Selain itu, wilayah dengan warna biru dapat dijadikan model kebijakan untuk diterapkan di wilayah lain. Peta ini menunjukkan pentingnya analisis spasial dalam memahami hubungan antara ketimpangan gender, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan untuk menciptakan strategi pembangunan yang lebih efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berjudul "*Analisis Spasial Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan Pendekatan OLS dan GWR*", dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) dan ketimpangan gender (IKG) secara signifikan memperburuk tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Daerah-daerah dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi secara konsisten menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih besar, mencerminkan hubungan erat antara ketimpangan sosial-ekonomi dan kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu difokuskan pada pengurangan kesenjangan pendapatan dan gender untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki efek yang berlawanan dengan variabel lain dalam penelitian ini, yaitu memberikan kontribusi positif dalam membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Kebijakan ini berperan penting dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan jaminan penghasilan minimal bagi para pekerja, terutama di sektor formal. Namun, pengaruh UMK terhadap tingkat kemiskinan tidak bersifat seragam di semua wilayah. Efektivitasnya bervariasi antar kabupaten/kota, yang sangat bergantung pada keberagaman struktur ekonomi, seperti dominasi sektor formal atau informal, tingkat industrialisasi, serta kapasitas pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan UMK. Oleh karena itu, dalam

merancang kebijakan yang terkait dengan penetapan UMK, perlu dipertimbangkan kondisi spesifik setiap daerah untuk memastikan kebijakan tersebut dapat berfungsi optimal dalam mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan.

3. Variasi spasial pengaruh dari ketiga variabel yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik lokal yang unik, yang memengaruhi hubungan antara variabel-variabel tersebut dan tingkat kemiskinan. Hal ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan perbedaan kondisi antarwilayah dalam proses perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan. Dengan memahami variasi ini, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi spesifik masyarakat di masing-masing daerah. Pendekatan berbasis karakteristik lokal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi program, tetapi juga memperkuat dampak yang dihasilkan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Analisis OLS menunjukkan bahwa semua variabel memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan, artinya peningkatan dalam salah satu variabel independen cenderung menurunkan kemiskinan. Analisis GWR lebih lanjut mengungkapkan variasi geografis pengaruh masing-masing variabel, dengan wilayah tertentu menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap variabel-variabel tertentu. Sebagai contoh, daerah dengan ketimpangan gender tinggi atau distribusi pendapatan tidak merata lebih rentan terhadap kemiskinan, sementara di daerah lain dampak UMK lebih terasa dalam pengurangan kemiskinan. Hasil penelitian juga menyoroti bahwa meskipun ketimpangan pendapatan di beberapa wilayah meningkat, tingkat kemiskinan menurun karena peran kebijakan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa wilayah tetap memerlukan perhatian khusus karena tantangan besar dari sisi ketimpangan gender dan pendapatan. Dalam analisis ini, kami mengajukan beberapa rekomendasi, seperti peningkatan kesetaraan gender termasuk peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup layak, serta optimalisasi kebijakan UMK guna intervensi tambahan seperti insentif bagi usaha kecil atau pelatihan keterampilan untuk pekerja informal.

Daftar Pustaka

- Bappeda Jateng. *Geografi dan Demografi*. Edatabase Bappeda Jateng. Diakses pada 21 November 2024.
https://edatabase.bappeda.jatengprov.go.id/images/311207_GEOGRAFI%20DAN%20DEMOGRAFI%202020.pdf
- BPS Indonesia. (2023). *Profil Kemiskinan Indonesia Maret 2023*. Diakses pada 21 November 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2020). *Kajian Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Lampung*. Dinas PPPA Lampung. https://dinaspppa.lampungprov.go.id/berkas/uploads/kajian_penghitungan_indeks_ketimpangan_gender.pdf

- Dzulfaroh, N, A. Hardiyanto, S. (2023). *5 Provinsi Paling Miskin di Pulau Jawa, Mana Saja?*. Kompas.com. Diakses pada 21 November 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/14/133000865/5-provinsi-paling-miskin-di-pulau-jawa-mana-saja-?page=all>
- Inequality.org. (n.d.). *Gender inequality*. Retrieved December 2, 2024, from <https://inequality.org/facts/gender-inequality/>
- Iskandar, M. & Sari, R. (2017). *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. <http://repository.fe.unj.ac.id/5922/5/Chapter3.pdf>
- Kartika, S. Sufri. Gusmi, K. (2020). *Penggunaan Metode Geographically Weighted Regression (GWR) Untuk Mengestimasi Faktor Dominan yang Mempengaruhi Penduduk Miskin di Provinsi Jambi*. Journal of Mathematics: Theory and Applications Repository Unja, 2(2). Diakses pada 21 November 2024. <https://repository.unja.ac.id/20685/>
- Katadata. (2023). *UMK Adalah: Upah Minimum Kabupaten dan Kota, Ini Penjelasan*. Katadata. <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/656da1492983f/umk-adalah-upah-minimum-kabupaten-dan-kota-ini-penjelasan>
- Putra, A. & Andriani, D. (2021). *Analisis Pengaruh Kebijakan Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja di Sektor Industri* (Skripsi). Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <https://e-journal.uajy.ac.id/22393/3/IE%20221967.pdf>
- Raharjo, B. & Anwar, M. (2020). *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, 6(1), 15-25. <https://journal.unnes.ac.id/sju/ujm/article/view/17103/13552>
- Universitas Medan Area. (2018). *Pengaruh Upah Minimum terhadap Kinerja Karyawan di Sektor Industri* (Tesis). Universitas Medan Area. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1012/5/111801068_file%205.pdf
- Wikipedia. (2013). *Berkas:Peta administratif jawa tengah.gif*. Wikipedia. Diakses pada 21 November 2024. https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_administratif_jawa_tengah.gif
- Wikipedia. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia*. Diakses pada 2 Desember 2024 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia
- World Bank. (2007). *Inequality in developing countries: A review of the literature* (Policy Research Working Paper No. 4349). Retrieved December 2, 2024, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/758041468340239015/pdf/wps4349.pdf>